



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIASIH PANTI RAHAYU
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 64783

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.511.093.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 434 m2/1002 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 2.511.093.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 750.500.000

1. MOTOR, HONDA CMX500AH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI BJ250L Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR SUPER CUB 800 Tahun 1983, WARISAN Rp. 2.000.000
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA IGET Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOTOR, HONDA C125K Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. MOBIL, MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.5L ULTIMATE (4X2) A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. MOTOR, VESPA PRIMAVERA I GET 150 ABS AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
8. MOTOR, HONDA ST125AP IN MT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
9. MOBIL, SUZUKI A1J31OF GS 4X2 MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.378.800.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.292.724.749
F. HARTA LAINNYA	Rp.	800.000.000
Sub Total	Rp.	7.733.117.749
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.733.117.749

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.